



**BAGIAN PKORB**  
**BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI**

# **LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI**

**TRIWULAN 1**

**SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya kami masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI sekaligus penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan 1 Tahun 2024 dengan lancar dan sukses. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan RB dari Triwulan 1 Tahun 2024, termasuk capaian program dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat menjadi bahan acuan dan *feed back* untuk mendukung pelaksanaan evaluasi internal dan evaluasi eksternal, serta penyusunan rencana kerja pelaksanaan RB di tahap berikutnya.

Kepada Tim RB Tahun 2024, kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas kerja kerasnya dalam pelaksanaan RB Sekretariat Jenderal DPR RI Triwulan 1 Tahun 2024. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan RB Triwulan 1 Tahun 2024 ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan RB ke depannya.

Jakarta, April 2024

Ketua Tim Reformasi Birokrasi 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Helmizar', written over the printed name.

Drs. Helmizar, M.E.

## A. Latar Belakang

Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, Reformasi Birokrasi (RB) menjadi ujung tombak terciptanya *World Class Bureaucracy* yang tertuang sebagai visi dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Memasuki periode terakhir dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi, pelaksanaan RB pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasi.

Upaya percepatan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. Oleh karena itu, upaya percepatan perlu disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dengan begitu, upaya percepatan pelaksanaan RB dapat berdampak positif terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan RB, Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan hasil pencapaian RB di tingkat instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan RB didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para *stakeholder*.

Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa monitoring dan evaluasi RB merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan RB. Kegiatan yang dilaksanakan per triwulan ini akan menjadi pelengkap dari perencanaan dan implementasi kebijakan RB yang akan mendorong proses perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan RB di triwulan berikutnya, serta peningkatan capaian pelaksanaan kegiatan RB Sekretariat Jenderal DPR RI ke depannya.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1178 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 – 2024.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RB Triwulan I Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan hasil pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Memonitor pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2024 pada setiap indikator kegiatan utama RB di Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Memberikan saran perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Menentukan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI guna meningkatkan hasil pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI.

## LAPORAN PELAKSANAAN RB GENERAL TRIWULAN I TAHUN 2024 SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

RB General berfokus pada penyelesaian isu hulu, yaitu perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan sasaran *Road Map* RB 2020-2024. Pada tingkatan instansional/level mikro, pelaksanaan RB mencakup implementasi kebijakan maupun program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta program inovasi RB yang diperlukan untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang penajaman *Road Map* RB Nasional, penilaian RB kini terdiri dari pelaksanaan RB General dan RB Tematik. RB General dilakukan atas 17 (tujuh belas) Kegiatan Utama dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kegiatan Utama. Sedangkan RB Tematik terdiri atas lima tema yang mendukung tujuan Pembangunan Nasional. Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB General Sekretariat Jenderal DPR RI beserta capaiannya pada Triwulan II Tahun 2024.

### A. PROGRES CAPAIAN RENCANA AKSI RB GENERAL DAN INDIKATOR RB GENERAL TRIWULAN I TAHUN 2024

#### 1. Penyederhanaan Birokrasi: Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
KemenPANRB	4	26,98	26,98	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan kajian penyederhanaan birokrasi	Jumlah kajian penyederhanaan birokrasi	-	-	-	1	Rp. 350.039.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Penyampaian usulan penyederhanaan birokrasi	Jumlah surat usulan penyederhanaan birokrasi	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Penetapan struktur organisasi berdasarkan surat persetujuan penataan organisasi	Jumlah Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Pada indikator kegiatan Penyederhanaan Birokrasi, pelaksanaan rencana aksi dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan 4. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan 1.

## 2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
KemenPANRB	-	3	4	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Evaluasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan evaluasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 49.800.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Sosialisasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi	-	-	-	1	Rp. 53.150.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Implementasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan implementasi sistem dan mekanisme kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Pada indikator kegiatan Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN, pelaksanaan rencana aksi dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan 3 dan 4. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan 1.

**3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional:**  
**a. Indeks SPBE**

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Capaian 2023</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
KemenPANRB	2,95	3,57	3,6	Pusat Teknologi Informasi

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Meningkatkan penerapan manajemen aset TIK	Laporan penerapan dan dokumentasi pengelolaan aset TIK yang fokus pada perangkat keras dan perangkat lunak	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Meningkatkan penerapan manajemen risiko SPBE terhadap unit kerja (UPR)	Laporan peningkatan ruang lingkup UPR berdasarkan prioritas risiko SPBE	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Menyusun dan menerapkan pedoman pengelolaan perubahan layanan TIK	Tersusunnya kebijakan/pedoman perubahan layanan SPBE dengan fokus pada perubahan layanan TIK yang diterapkan DPR RI	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Mengukur utilitas aplikasi/sistem informasi	Hasil evaluasi utilitas pemanfaatan aplikasi/sistem informasi di DPR RI	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2029	RITIK dan Peta Jalan TIK Tahun 2025- 2029 yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional	1	1	1	1	Rp. 800.000.000	Telah terlaksana

Berkaitan dengan rencana aksi penerapan manajemen aset TIK, Pusat Teknologi dan Informasi bersama dengan Bagian Administrasi BMN telah melakukan Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Hasil Penilaian SPBE Tahun 2023 pada tanggal 15 Februari 2024. Melalui

Rapat Koordinasi tersebut teridentifikasi adanya *silo system* pada manajemen aset TIK, dimana Pustekinfo menggunakan aplikasi SIJAKA untuk pengelolaan aset dan barang TIK, sedangkan Bagian Administrasi BMN telah menggunakan aplikasi DigitAll yang telah terintegrasi dengan SAKTI. Untuk itu, disepakati bahwa SIJAKA tidak akan digunakan kembali dan Pustekinfo akan menggunakan aplikasi DigitAll sepenuhnya untuk pengelolaan aset TIK dengan penunjang operator dengan SK.



Gambar 1.1. Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Hasil Penilaian SPBE 2023

Kemudian untuk rencana aksi penerapan manajemen risiko SPBE terhadap unit kerja (UPR), telah dilakukan Rapat Koordinasi bersama Konsultan Perencanaan Manajemen Risiko dan Aset Teknologi Informasi pada tanggal 13 Februari 2024 terkait kegiatan penyusunan *risk register* TI yang akan segera dilakukan berbasis identifikasi aplikasi pada unit kerja. Kegiatan ini meliputi penyusunan *risk register* TI pada 10 (sepuluh) unit kerja Eselon II berdasarkan PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Adapun daftar dari unit kerja Eselon II yang direncanakan, adalah sbb:

1. Pusat teknologi Informasi (SIJAKA, Stela, Office 365, Simfoni, Esign);
2. Biro Kesekretariatan Pimpinan (SIGOTA, Sniper);
3. Biro Keuangan (Aladin, Semar);
4. Biro Perencanaan dan Organisasi (Sincan, Sicaput);
5. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (JDIH, Legalitas);
6. Biro Protokol dan Humas (SIEKA, PPID, SiAr, Perpustakaan, kliping);

7. Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif (Sidiklat, LMS);
8. Biro SDMA (SIMATA, SIAP, Absensi, Sirajin);
9. Biro Persidangan I (SIRIH, AKD);
10. Biro Persidangan II (SILEG, AKD).



Gambar 1.2. Rapat Perencanaan Kegiatan Jasa Konsultan dengan CBQA

Selanjutnya untuk rencana aksi penyusunan dan penerapan pedoman pengelolaan perubahan layanan TIK telah diawali dengan penyusunan SK Manajemen Perubahan Layanan Teknologi Informasi dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perubahan Layanan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dengan formulir RFC (*Request For Change*) sebagai turunan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Penyusunan draft pedoman pengelolaan perubahan layanan TIK akan dilaksanakan tanggal 27 Maret 2024 dan berlanjut ke Triwulan II.



Gambar 1.3. Rapat terkait Pedoman Perubahan Layanan TI

Pada rencana aksi pengukuran utilitas aplikasi/sistem informasi, telah dilakukan Rapat Koordinasi bersama Konsultan Perencanaan Manajemen Layanan Teknologi Informasi pada tanggal 13 Februari 2024. Adapun kegiatan ini meliputi penyusunan SOP untuk kebutuhan Audit ISO 2000, penyusunan petunjuk teknis dan pengukuran efektifitas pengelolaan aplikasi di DPR RI untuk mengidentifikasi utilisasi atau kebermanfaatan seluruh aplikasi di DPR RI.

Pada rencana aksi penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2030, telah dilakukan Rapat Koordinasi bersama Konsultan Penyusunan RITIK dari Universitas Indonesia pada tanggal 19 Maret 2024. Hasil dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. RITIK yang baru perlu memperhatikan penilaian-penilaian yang ada (SPBE, EPSS, dll);
- b. Jika perkembangan teknologi dirasa cepat, maka RITIK bisa disusun per 3 (tiga) tahun;
- c. Penyusunan RITIK akan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI, dan melakukan perbandingan dengan negara lain terkait *trend* teknologi yang berlangsung;
- d. Disarankan perlu penganggaran di Tahun 2025 untuk kegiatan penerapan AI.



Gambar 1.4. Rapat Koordinasi terkait Pengadaan Jasa konsultan Penyusunan RITIK dengan Universitas Indonesia

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/WJfrDbcjXySTrsz>

**b. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE**

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
KemenPANRB	-	1	3	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melakukan evaluasi internal kebijakan terkait Arsitektur SPBE	Laporan evaluasi dan rekomendasi eksistensi pengaturan arah pemanfaatan Arsitektur SPBE sebagai pedoman keterpaduan/integrasi SPBE	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melakukan reviu aktual atas Arsitektur SPBE As-Is DPR RI	Laporan pembaharuan Arsitektur SPBE As-Is DPR RI pada aplikasi SIA SPBE V2 Kementerian PANRB	1	1	1	1	Rp. 60.000.000	Telah terlaksana
Menyusun Arsitektur SPBE To-Be DPR RI	Laporan penyusunan arsitektur SPBE To-Be DPR RI pada aplikasi SIA SPBE V2 Kementerian PANRB	-	1	1	1	Rp. 60.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2-4
Melakukan <i>gap analysis</i> dan menyusun Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE	Laporan penyusunan Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE	-	1	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2-4

Pada rencana aksi evaluasi kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE, telah dilakukan Rapat Koordinasi bersama Konsultan Penyusunan RITIK dari Universitas Indonesia pada tanggal 19 Maret 2024. Melalui rapat koordinasi tersebut, disimpulkan bahwa penyusunan RITIK yang baru harus diselaraskan dengan Perpres Nomor 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional yang memuat kerangka kerja, referensi arsitektur, domain, dan inisiatif strategi penerapan Arsitektur SPBE Nasional pada RITIK Sekretariat Jenderal DPR RI. Bersamaan dengan itu, penyusunan RITIK Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2029 juga harus merujuk pada evaluasi RITIK sebelumnya.



Gambar 1.5. Rapat Koordinasi terkait Pengadaan Jasa konsultan Penyusunan RITIK dengan Universitas Indonesia

Selanjutnya pada rencana aksi reviu aktual atas Arsitektur SPBE As-Is DPR RI, telah dilakukan Rapat Evaluasi Hasil SPBE dan Pemutakhiran Data Arsitektur SPBE As-Is Tahun 2024 bersama Kementerian PANRB pada 23 Februari 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pengisian Arsitektur SPBE saat ini menggunakan aplikasi SIA SPBE V2 yang berbasis web pada alamat [arsitektur.spbe.go.id](http://arsitektur.spbe.go.id) dengan diberikan 1 (satu) akun per K/L namun bisa digunakan secara bersamaan sehingga pengerjaan bisa paralel (maksimal 5 *session* dalam satu waktu);
- Telah dilakukan pemutakhiran Arsitektur As-Is pada SIA SPBE dengan kondisi saat ini:
  - Arsitektur Proses Bisnis: 15 (lima belas) proses bisnis;
  - Arsitektur Layanan: 81 (delapan puluh satu) layanan;
  - Arsitektur Data: 309 (tiga ratus Sembilan) data;
  - Arsitektur Infrastruktur: 4 (empat) fasilitas komputasi, 4 (empat) SPLP, 2 (dua) JIP, 1 (satu) komputasi awan, 25 (dua puluh lima) perangkat keras jaringan, 9 (sembilan) perangkat keras keamanan, 4 (empat) perangkat keras media penyimpanan, 6 (enam) perangkat keras periferi, 50 (lima puluh) perangkat keras server, 21 (dua puluh satu) perangkat lunak platform;
  - Arsitektur Aplikasi: 107 (seratus tujuh) aplikasi;
  - Arsitektur Keamanan: 2 (dua) edukasi kesadaran keamanan SPBE, 4 (empat) identifikasi kerentanan keamanan SPBE, 1 (satu) penanganan insiden keamanan SPBE, 14 (empat belas) peningkatan keamanan SPBE, 6 (enam) standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.



Gambar 1.6. Rapat Koordinasi terkait Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE v2 dan Pemutakhiran Data Arsitektur SPBE 2024

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/F49GJqnaMrRymyf>

**4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Indeks Perencanaan Pembangunan**

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Capaian 2023</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
KemenPANRB	-	91,88	92	Biro Perencanaan dan Organisasi

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Penguatan Perencanaan	Tersusunnya Revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Rencana Kerja DPR RI TA 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Revisi Rencana Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI TA 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Peningkatan keselarasan informasi kinerja	Penyusunan Pohon Kinerja	1	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya dokumen Penyesuaian Perjanjian Kinerja 2024	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Rencana aksi revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 dilakukan seiring dengan perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 sendiri telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan IV Tahun 2023.

Kemudian untuk rencana aksi penyusunan Rencana Kerja DPR RI Tahun 2024 pada dasarnya telah dimulai pada bulan April 2023 dengan dikeluarkannya Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dengan Kementerian Keuangan tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2024,

sampai dengan bulan Desember 2023 seiring dengan diterbitkannya DIPA DPR TA 2023. Beriringan dengan siklus perencanaan anggaran, Rencana Kerja juga selalu dilakukan perbaikan atau penyesuaian mengikuti perubahan anggaran yang terjadi sepanjang bulan April hingga Desember.

Selanjutnya, rencana aksi yang ditetapkan untuk indikator Indeks Perencanaan Pembangunan adalah penyusunan revisi Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024. Kegiatan ini ditetapkan sebagai rencana aksi karena adanya perubahan struktur organisasi, sehingga Rencana Kerja harus diselaraskan dengan informasi kinerja DPR RI. Revisi Rencana Kerja TA 2024 diawali dengan Surat Sekretaris Jenderal Nomor T/14770/PR.03/12/2023 perihal Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2023. Sebagai rangkaian agenda penyusunan Revisi Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024, dilaksanakan *Trilateral Meeting* Pembahasan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI TA 2024 antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Agenda kemudian dilanjutkan dengan revisi Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI TA 2024 Satker Sekretariat Jenderal pada Aplikasi KRISNA pada tanggal 24 Maret 2024, sehingga revisi Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI TA 2024 telah selesai dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024.

Rencana aksi lainnya adalah penyusunan Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini disusun secara simultan dengan penyusunan revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 pada Triwulan IV Tahun 2023. Pohon Kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja DPR RI dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen Rencana Strategis.

Sama halnya dengan penyusunan Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI, rencana aksi penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 telah dilakukan secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang dilakukan pada Triwulan III dan IV Tahun 2023, yang kemudian disahkan pada bulan Desember 2023.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/d2E6y9TazY99Dr5>

#### **5. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Capaian 2023</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
KemenPANRB	67,28	67,46	76	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan Perencanaan Kinerja	Tersusunnya Cascading dan Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai PermenPANRB No. 89 Tahun 2021	-	1	-	-	Rp. 25.875.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
	Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja 2024 berdasarkan Laporan Kinerja 2023	-	1 (50%)	1 (50%)	-	Rp. 25.500.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2 dan 3
	Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI 2025	-	-	1 (50%)	1 (50%)	Rp. 26.250.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3 dan 4
	Tersusunnya Rencana Aksi 2024 Eselon I dan II	26	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penguatan Pengukuran Kinerja	Pembangunan aplikasi e-SAKIP	1 (25%)	1 (25%)	1 (25%)	1 (25%)	Rp. 220.360.000	Telah terlaksana
	<i>Updating</i> data Aplikasi SIMATA untuk pengelolaan rotasi mutasi	-	1	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2 dan 4
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	-	-	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3 dan 4
Penguatan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya Laporan Kinerja 2023 di Tingkat Eselon I dan II yang sesuai dengan PermenPANRB No.53 Tahun 2014	26	-	-	-	Rp. 174.258.000	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan Evaluasi	-	1	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Kinerja Triwulanan Tahun 2024						dilaksanakan pada Triwulan 2- 4
Optimalisasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Tersusunnya Dokumen Evaluasi SAKIP Internal	-	-	5	-	Rp. 60.084.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut atas Evaluasi APIP	-	1	-	-	Rp. 5.808.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
	Pemberian <i>reward</i> atas penilaian SAKIP unit kerja	-	-	1	-	Rp. 60.084.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Pada rencana aksi penyusunan Rencana Aksi 2024 Eselon I dan II, telah dikirimkan surat permohonan penyusunan Rencana Aksi Kinerja kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 20 Februari 2024. Dokumen Rencana Aksi 2024 dari seluruh Eselon I dan II tersebut kemudian telah disusun dan dikompilir oleh Biro Perencanaan dan Organisasi untuk kemudian menjadi dasar dalam pengukuran kinerja unit kerja.

Kemudian untuk rencana aksi pembangunan aplikasi SAKIP di Triwulan I ini berfokus pada pemenuhan data perencanaan kinerja seluruh unit-unit Eselon II mulai dari pemenuhan data rencana kerja jangka menengah pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 maupun rencana kerja tahunan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Rencana aksi yang terlaksana pada Triwulan I ini kemudian akan dilanjutkan dengan penginputan rencana aksi unit kerja pada aplikasi e-SAKIP sebagai dasar dari pengukuran kinerja unit kerja yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan II. Data kinerja yang telah diinput dalam aplikasi e-SAKIP nantinya akan terhubung dengan laman web [e-sakip.dpr.go.id](http://e-sakip.dpr.go.id) sehingga pengelolaan SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI dapat diakses oleh publik.

Selanjutnya, pada rencana aksi penyusunan Laporan Kinerja 2023 di Tingkat Eselon I dan II sesuai dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014, telah dibuat surat permohonan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 kepada seluruh Eselon I dan II pada bulan Desember 2023. Dalam hal ini, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) telah menyusun *outline* sebagai panduan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *Outline* tersebut telah

digunakan oleh para unit kerja untuk menyusun Laporan Kinerja sehingga diharapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dituangkan dengan jelas dalam Laporan Kinerja. Seluruh Laporan Kinerja juga telah dilakukan revidi oleh Inspektorat Utama selaku pengawas internal Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memastikan agar data yang tersaji dalam Laporan Kinerja akurat, andal, dan valid.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disusun kemudian dikirimkan kepada Kementerian PANRB dan BAPPENAS sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan dikirimkan pula kepada Kementerian Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada akhir bulan Februari 2024. Dokumen tersebut juga telah di *upload* ke dalam [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id). Selain itu, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI telah dipublikasikan di *website* [dpr.go.id](http://dpr.go.id) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Lembaga kepada publik.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/jKHzaNrAHoZ5A2K>

#### 6. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
KemenPANRB	4 unit	5 unit	6 unit	Inspektorat I dan II

<i>Rencana Aksi</i>	<i>Indikator Output</i>	<i>Target Penyelesaian</i>				<i>Jumlah Anggaran</i>	<i>Penjelasan Capaian</i>
		<i>TW 1</i>	<i>TW 2</i>	<i>TW 3</i>	<i>TW 4</i>		
Penetapan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	SK pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1	-	-	-	Rp. 2.904.000	Telah terlaksana
Pendampingan pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama	Laporan Pendampingan ZI	4	4	-	-	Rp. 17.424.000	Telah terlaksana
Pembangunan dan Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit ZI	-	5	-	-	Rp. 17.424.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Melaksanakan survey penilaian persepsi korupsi dan survey penilaian kualitas pelayanan	Laporan survey	-	5	-	-	Rp. 17.424.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Evaluasi unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM sesuai PermenPANRB No. 90 Tahun 2021	Dokumen persyaratan pengajuan unit ZI	-	1	-	-	Rp. 17.424.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Evaluasi pembangunan ZI oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN)	Surat pengajuan unit kerja menuju WBK	-	1	-	-	Rp. 17.424.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Proses evaluasi oleh TPN	Surat undangan wawancara	-	-	1	-	Rp. 2.904.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Surat Permintaan validasi survei ZI	-	-	1	-	Rp. 2.904.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Verifikasi lapangan unit ZI	-	-	1	-	Rp. 2.904.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Lembar Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB	-	-	-	1	Rp. 2.904.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Dalam upaya pelaksanaan rencana aksi penetapan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, telah diterbitkan Surat Keputusan No. 396/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Unit Kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.

Kemudian dari 8 (delapan) unit kerja yang diusulkan menjadi unit pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Tahun 2024, terdapat 4 (empat) unit kerja yang telah dilaksanakan pendampingan pembangunannya oleh Inspektorat Utama, yaitu:

1. Biro Protokol dan Humas;
2. Biro Kesekretariatan Pimpinan;

3. Biro Pemberitaan Parlemen;
4. Biro Persidangan I.

Laporan Pendampingan Pembangunan Unit ZI Menuju WBK Tahun 2024 yang merupakan bentuk *output* dari rencana aksi pendampingan pembangunan ZI dapat diakses melalui *link* tercantum. Sedangkan untuk pendampingan pembangunan ZI pada Biro SDMA, Pusat Teknologi dan Informasi, Biro Keuangan, dan Biro Perencanaan dan Organisasi akan mulai dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Maret 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/jNHPIyFgNS9yCWt>

#### 7. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Capaian 2023</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
BPKP	Level 3 (3,185)	Level 3 (3,270)	Level 3 (3,28)	Inspektorat II

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Melaksanakan proses Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi secara substansi dan prosedur penilaian mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021	SK Tim Penilaian Mandiri (PM) dan SK Tim atau Surat Tugas Penjaminan Kualitas (PK) yang mana pesertanya telah mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi SPIP	-	2	-	-	Rp. 110.119.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan dengan capaian sebelumnya	Dokumen Indikator dan Target Kinerja PK yang telah direvisi	-	1	-	-	Rp. 5.808.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Pembuatan <i>cascading</i> kinerja berdasarkan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i>	Dokumen <i>cascading</i> kinerja	-	1	-	-	Rp. 5.808.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Melakukan analisis risiko terkait dengan risiko korupsi pada	<i>Risk Register</i> dan Laporan penyusunan peta risiko korupsi dan	-	-	1	-	Rp. 5.808.000	Rencana Aksi akan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
kegiatan utama yang menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian yang terjadwal	rencana tindak pengendalian						dilaksanakan pada Triwulan 3
Analisis risiko digunakan sebagai dasar bahan penyusunan rencana tindak pengendalian dan secara berkala mendokumentasikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian dengan baik	Laporan Monitoring Penanganan Risiko	-	-	1	-	Rp. 5.808.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Melakukan monitoring dan dievaluasi secara berkala atas pelaksanaan sistem antikorupsi yang sudah ada (FCP)	Laporan atas monitoring dan evaluasi atas pedoman, peta proses bisnis dan SOP	-	-	-	1	Rp. 5.808.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Memantau dan mengoptimalkan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK untuk meminimalkan terjadinya temuan berulang, temuan terkait pengelolaan BMN, dan temuan terkait ketaatan	Laporan atas pemantauan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK	-	1	1	1	Rp. 103.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2-4

Pada indikator kegiatan Penguatan Implementasi SPIP, target penyelesaian rencana aksi dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan 2. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan 1.

**8. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)**

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
KemenPANRB	100%	2	4	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

<i>Rencana Aksi</i>	<i>Indikator Output</i>	<i>Target Penyelesaian</i>				<i>Jumlah Anggaran</i>	<i>Penjelasan Capaian</i>
		<i>TW 1</i>	<i>TW 2</i>	<i>TW 3</i>	<i>TW 4</i>		
Pembangunan aplikasi/ <i>dashboard</i> pengaduan berbasis AI	Aplikasi/ <i>dashboard</i> pengaduan berbasis AI	-	-	-	1	Menggunakan anggaran Pusat Teknologi dan Informasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Publikasi media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI	Unggahan konten media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI ke sosial media Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	-	1	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2 dan 4
Pembuatan video testimoni pengaduan masyarakat oleh anggota DPR RI	Video testimoni pengaduan masyarakat oleh Anggota DPR RI	-	-	1	-	Rp. 10.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan terintegrasinya Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	2	-	-	-	Rp. 206.400.000	Telah terlaksana
Koordinasi pembahasan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi	Terlaksananya koordinasi tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi	1	1	-	-	Rp. 120.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
dan Pengaduan Masyarakat	dan Pengaduan Masyarakat						
FGD optimalisasi tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai dukungan peningkatan kualitas tugas dan fungsi pengawasan DPR RI	Tercapainya SDM yang kompeten dalam mengelola pengaduan masyarakat	1	-	1	-	Rp. 6.800.000	Telah terlaksana
Bimtek pengelolaan pengaduan masyarakat	Tercapainya SDM yang kompeten dalam mengelola pengaduan masyarakat	-	-	-	1	Anggaran Pusbangkom	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Seluruh rencana aksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat selaku penanggungjawab sesuai dengan waktu dan target yang ditetapkan. Pada rencana aksi pembangunan aplikasi/*dashboard* pengaduan berbasis AI, telah dirancang melalui beberapa kali rapat. Pada tanggal 12 Februari 2024, rapat dilakukan dengan agenda pembahasan mengenai penyempurnaan aplikasi Pengaduan Masyarakat oleh PT. Siji. Kemudian rapat dengan agenda pembahasan yang sama dilanjutkan pada tanggal 26 Februari 2024. Selanjutnya, rapat dengan agenda diskusi pengembangan aplikasi Pengaduan Masyarakat agar terintegrasi dengan SP4N LAPOR!.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat, khususnya melalui aplikasi SIDUMAS dan aplikasi SP4N LAPOR!, ditetapkan rencana aksi untuk membentuk Tim Pengelolaan Layanan Informasi Pengaduan Masyarakat melalui surat, *website* dan notifikasi Whatsapp; Tim Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat; dan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Selanjutnya, rencana aksi koordinasi pembahasan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dan Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 dengan pembahasan optimalisasi tindak lanjut surat aspirasi dan pengaduan masyarakat oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Kemudian untuk rencana aksi penguatan Sumber Daya Manusia telah dilaksanakan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Sebagai Dukungan Untuk Peningkatan Kualitas Tugas dan Fungsi Pengawasan DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024.

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ekjLQWW3KFWHbJ9>

## 9. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Capaian 2023</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
KemenPANRB	77,43	59,7	78,9	Inspektorat Utama

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Melaksanakan sosialisasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Edaran terkait kewajiban PPK dalam menyusun kertas kerja rencana umum pengadaan dan menginput Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi SIRUP	Dokumen rekapitulasi minimal 70% dari total nilai pengadaan telah diinput dalam Aplikasi SIRUP	1	-	-	-	Rp. 30.000.000	Telah terlaksana
Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait <i>e-purchasing</i> dan tata cara perhitungan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Rp. 349.332.000	Telah terlaksana
Melaksanakan sosialisasi <i>probity audit</i>	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK dengan mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait penginputan data Pengadaan	Persentase peserta yang hadir dalam bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	-	-	1	Rp. 103.426.746	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Barang/Jasa (PBJ) di Aplikasi SIRUP							
Melaksanakan pembinaan kepada vendor/penyedia terkait pengenalan e-katalog sektoral, kewajiban membuat pakta integritas, serta informasi lain terkait pengadaan di Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase vendor/penyedia yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 91.368.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Menyusun rencana aksi dari hasil evaluasi Sistem Merit di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023	Rencana Aksi terkait evaluasi Sistem Merit yang telah disusun dan diformalkan oleh Kepala Biro SDMA	-	1	-	-	Rp. 333.159.040	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Melakukan monitoring terkait tindak lanjut rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari hasil evaluasi Sistem Merit	Minimal 50% dari total rekomendasi telah ditindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi Sistem Merit	-	1	-	-	Rp. 6.900.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Melakukan sosialisasi terhadap Manajemen Talenta di Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase Peserta yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 320.452.950	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Melaksanakan <i>workshop</i> tentang disiplin pegawai	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Rp. 186.000.000	Telah terlaksana
Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 3 Tahun 2021	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 39.238.500	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	70% dari total jumlah undangan						
Menandatangani Pakta Integritas oleh calon pimpinan/pejabat di instansi	Minimal 50% dari total calon pimpinan/pejabat instansi telah menandatangani Pakta Integritas sebelum memangku jabatannya	-	-	-	1	Rp. 38.955.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Melaksanakan sosialisasi pencegahan terkait kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi, pengaduan dan perlindungan terhadap pelapor	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 39.238.500	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi	Minimal 50% dari kasus suap/gratifikasi telah dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Utama	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Mengikutsertakan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam pelatihan <i>e-Learning</i> KPK terkait Antikorupsi dan Integritas	Minimal 50% dari total tim UPG telah mengikuti <i>e-Learning</i> KPK terkait Antikorupsi dan Integritas	-	-	-	1	Rp. 2.904.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Menyusun dan melakukan sosialisasi kebijakan terkait kewajiban dalam penyusunan laporan kegiatan tim untuk intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan honor kegiatan	Minimal 50% dari total jumlah tim telah menyusun laporan kegiatan	-	1	-	-	Rp. 200.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Menyusun dan melakukan sosialisasi kebijakan terkait pemberian bukti	Minimal 50% dari setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas telah	-	1	-	-	Rp. 200.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
<i>timestamp</i> keterangan <i>geolocation</i> dalam hal intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan perjalanan dinas	memberikan bukti <i>timestamp</i> keterangan <i>geolocation</i> dalam hal intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan perjalanan dinas						
Menyusun dan melakukan sosialisasi kebijakan terkait pemberian bukti <i>timestamp</i> keterangan <i>geolocation</i> dalam hal intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan perjalanan dinas	Tersusunnya Laporan PIPK terkait pengendalian tambahan terhadap transport lokal serta menilai efektivitas pengendalian yang sudah ada	-	-	1	-	Rp. 200.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Melaksanakan sosialisasi terkait perjalanan dinas kepada Tenaga Ahli	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Rp. 251.785.000	Telah terlaksana
Melaksanakan monitoring pengendalian intern atas proses bisnis dan pelaporan anggaran	Tersusunnya laporan monitoring pengendalian intern atas proses bisnis dan pelaporan anggaran	-	-	1	-	Rp. 300.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Rencana aksi pelaksanaan sosialisasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Edaran terkait kewajiban PPK dalam menyusun kertas kerja rencana umum pengadaan dan menginput Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi SIRUP telah terlaksana dengan persentase Pagu Belanja Barang/Jasa 2024 yang telah diinput Biro/PPK sebesar 100%. Bersamaan dengan itu, rencana aksi sosialisasi dan bimbingan teknis terkait *e-purchasing* dan tata cara perhitungan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pun juga telah terlaksana pada tanggal 23 Februari 2024 dengan persentase kehadiran sebesar 75%, yaitu total kehadiran sebanyak 84 peserta dari total 112 undangan.

Begitu pula dengan rencana aksi pelaksanaan sosialisasi terkait perjalanan dinas kepada Tenaga Ahli yang telah diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2024 dengan persentase kehadiran sebesar 99%, yaitu total kehadiran 671 peserta dari total 676 undangan. Sedangkan rencana aksi pelaksanaan *workshop* tentang disiplin pegawai telah terlaksana pada tanggal 27 Maret 2024 di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI dengan

persentase kehadiran peserta sebesar 96,74%, yaitu total kehadiran sebanyak 671 peserta dari total 676 undangan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/EaAnnoFwGmNjtNa>

#### 10. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
Kementerian Hukum dan HAM	-	98,80	99	Pusat Perancangan Undang-Undang

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
<b>Variabel I:</b> Membuat surat ke Kemenkumham mengenai indikator penilaian	Surat pernyataan mengenai indikator penilaian dan daftar RUU yang telah dilakukan harmonisasi	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
<b>Variabel II:</b> 1. TOR terkait pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	TOR pelatihan peningkatan kompetensi (FGD/Workshop/Seminar)	-	1	1	1	Rp. 132.120.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2-4
		1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
2. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi (FGD/Workshop/Seminar)	-	1	1	1	Rp. 132.120.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2-4
		1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
<b>Variabel III:</b> 1. Penyusunan SK dan Surat Tugas kegiatan kajian dan	1. SK pembentukan Tim Pelaksana	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang	Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi						
	2. Surat Tugas Tim Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
2. Penyusunan laporan hasil kajian dan evaluasi Undang-Undang	1. Dokumen daftar Undang-Undang yang telah dilakukan evaluasi	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	2. Dokumen laporan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang dan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi	7	7	7	2	Rp. 349.412.000	Telah terlaksana
3. Pengiriman rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-	Dokumen bukti dukung pengiriman rekomendasi	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang	hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang						
4. Penyusunan dokumen rekap data pejabat fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang dilibatkan dalam melakukan kajian dan evaluasi Undang-Undang	Dokumen rekap data pejabat fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
<b>Variabel IV:</b> 1. Pengumpulan Data Dukung Kebijakan pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	Dokumen Terkait Kebijakan Pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
2. Pelaksanaan Pengembangan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI (dengan kegiatan <i>Benchmarking</i> , <i>Konsinyering</i> )	Laporan Kegiatan <i>Benchmarking</i>	-	1	-	-	Rp. 48.758.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
3. Pelaksanaan Pelaporan Pengembangan	<i>Screenshot</i> bukti pengisian e- <i>Report</i>	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
JDIH melalui e-Report							
4. Membuat Abstrak Peraturan yang diunggah ke Website JDIH	Dokumen terkait Abstrak Peraturan yang diunggah di website JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
5. Mengumpulkan Capture Metadata Pengolahan Dokumen Hukum, URL Integrasi, Log Sinkronisasi Integrasi, Media Sosial	Screenshot Dashboard Portal JDIH	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
6. Menunggah aktivitas Pengelolaan dan Pengembangan JDIH, serta informasi mengenai JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Media Sosial JDIH (Instagram)	Screenshot bukti upload di media sosial	-	1	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2-4
7. Menyusun Rekapitulasi Data Produk Hukum yang telah diunggah di JDIH	Dokumentasi hasil rekapitulasi data produk hukum yang telah di unggah di JDIH	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Selama Triwulan I Tahun 2024, penanggungjawab IRH telah melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan. Pada rencana aksi harmonisasi sejumlah Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Alat Kelengkapan Dewan telah dilaksanakan oleh Badan Legislasi. Kemudian Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekuinbangkesra telah melaksanakan *workshop* terkait peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan dengan tema “*Workshop* Peningkatan Kualitas Naskah Akademik RUU” yang diselenggarakan tanggal 28-29 Februari 2024.

Bersamaan dengan itu, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang telah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan serta menghasilkan 3 (tiga) Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan 4 (empat) Buku Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Hasil kajian tersebut kemudian disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan terkait seperti Badan Legislasi, Komisi I, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi VIII. Sedangkan untuk rencana aksi yang berkaitan dengan JDIH, Biro Hukum telah menyusun Abstrak Peraturan yang dapat dilihat dan diunggah di Website JDIH. Hingga saat ini, Tim Kerja telah melakukan rapat koordinasi terkait pengisian LKE dan pemenuhan bukti dukung dalam aplikasi IRH.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/afMyRkHAn5G53rY>

#### 11. Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
ANRI	77,99	98,38	98,38	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pemeliharaan Kaset	Terpeliharanya Arsip Kaset	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mini DV	Terpeliharanya Arsip Mini DV	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan CD/DVD	Terpeliharanya Arsip CD/DVD	-	1	-	-	Rp. 100.000.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Pemeliharaan Mobile File ( <i>Roll O Pack</i> )	Terpeliharanya <i>Mobile File</i>	-	-	1	-	Rp. 134.080.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Pemeliharaan Mesin Cacah	Terpeliharanya Mesin Cacah	-	1	-	-	Rp. 50.000.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Pemeliharaan Mesin Potong	Terpeliharanya Mesin Potong	-	-	1	-	Rp. 50.000.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Pemeliharaan Lemari Kaset	Terpeliharanya Lemari	-	1	-	-	Rp. 90.000.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Penyimpanan Arsip Kaset						Triwulan 2
Sewa Ruang Arsip Satu	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Dua	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Tiga	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	-	-	1	1	Rp. 77.700.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3 dan 4
Workshop/Bimtek/Seminar/Focus Group Discussion (FGD)	Terselenggaranya kegiatan Workshop/Bimtek/Seminar/(FGD)	3	1	2	1	Rp. 112.500.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Persidangan	Tertatanya Arsip Persidangan	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Administrasi	Tertatanya Arsip Bidang Administrasi	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Keuangan	Tertatanya Arsip Bidang Keuangan	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Kepegawaian	Tertatanya Arsip Bidang Kepegawaian	-	-	1	-	Rp. 100.000.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Penataan Arsip Barang/Jasa	Tertatanya Arsip Barang/Jasa	1	-	-	-	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana

Pelaksanaan rencana aksi Digitalisasi Arsip pada Triwulan I yang mencakup Pemeliharaan Kaset, Pemeliharaan Mini DV, Sewa Ruang Arsip Satu, Sewa Ruang Arsip Dua, Penyelenggaraan Bimtek, Penataan Arsip Persidangan, Penataan Arsip Bidang Administrasi, Penataan Arsip Bidang Keuangan, dan Penataan Arsip Barang/Jasa telah terlaksana oleh Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat selaku penanggungjawab sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aJCBiekSejWQETY>

## 12. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
Badan Pusat Statistik	-	1,51	2,6	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Menyelaraskan data dengan Standar Data Statistik dan Data Induk/Kode Referensi	Data statistik sektoral yang dinilai telah sesuai dengan Standar Data Statistik Nasional dan Data Induk/Kode Referensi	-	2	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Melakukan dokumentasi setiap tahapan pengelolaan data meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data	Terdokumentasinya setiap tahapan pengelolaan data meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data	-	2	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Penyusunan prosedur pengelolaan data statistik sektoral	Disahkannya prosedur pengelolaan data statistik sektoral	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Melakukan pelatihan terkait pengelolaan data statistik sektoral	Terlaksananya pengembangan kompetensi SDM dalam bidang statistik sektoral yang diselenggarakan BPS	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Bimbingan teknis penggunaan Portal Satu Data DPR	Terlaksananya bimbingan teknis dengan Produsen Data dalam penggunaan Portal Satu Data DPR	-	1	-	-	Rp. 6.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS	Setiap kegiatan statistik sektoral yang dinilai telah dilaporkan ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi	1	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Pada rencana aksi pelatihan terkait pengelolaan data statistik sektoral, telah dilakukan pelatihan terkait pengelolaan data statistik sektoral melalui kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistika pada tanggal 22 – 24 Februari 2024. Kegiatan tersebut diikuti oleh anggota Tim Penilai Internal EPSS Sekretariat Jenderal DPR RI yang anggotanya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 394/SEKJEN/2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal EPSS Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain itu, telah diselenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi *Data Protection Officer* (DPO) pada tanggal 4 – 8 Maret 2024 yang merupakan penerapan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang manajemen data, dalam hal ini sekaligus sebagai tahapan penerapan UU Perlindungan Data Pribadi.

Kemudian untuk rencana aksi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS, telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Produsen Data BPS pada tanggal 2 Februari 2024 yang membahas terkait evaluasi pelaksanaan EPSS dan telah disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) data yang akan diajukan untuk penilaian, yaitu Kompilasi Data Pengaduan Masyarakat ke DPR RI Tahun 2023 dan Kompilasi Data Daftar Anggota DPR RI Tahun 2023. Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS ini telah dilakukan pada tanggal 14 Maret 2024 melalui aplikasi ROMANTIK.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/daK9g7ym6Hx4zXo>

### 13. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
LKPP	9,9	47,18	72	Biro Umum

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Membuat surat edaran kepada para PPK untuk	Surat Edaran Sekretaris	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
melakukan Pemanfaatan Sistem Pengadaaan pada aplikasi SPSE	Jenderal DPR RI No. 1484/TL.04/1/204						
Pendampingan penginputan RUP Tahun 2024	Nota Dinas, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan penginputan RUP Tahun 2024 dan Penyelesaian Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 pada aplikasi SPSE 4.5	Nota Dinas, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Koordinasi Penginputan RUP di Lingkungan Biro Umum	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Koordinasi Persiapan Evaluasi Penggunaan PDN dan UMK-Kop	Undangan Rapat dan Laporan Singkat	1	-	-	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Konsultasi dengan LKPP tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 6.000.000	Telah terlaksana
Evaluasi Penginputan RUP dan Persiapan Pelaksanaan Penginputan RUP TA 2024 ke Aplikasi SIRUP	Pointer, Rekapitulasi Progress RUP Satker Sekretariat Jenderal dan Satker Dewan	1	-	-	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Konsultasi dengan LKPP tentang Pemilihan Penyedia	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Koordinasi persiapan Pengumuman paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 bersama dengan Deputi Administrasi dan Deputi Persidangan serta Pejabat Tinggi Pratama	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 25.758.745	Telah terlaksana
Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan <i>Parliamentary Meeting on The Occasion Of the 10th World Water Forum</i>	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Finalisasi Penginputan RUP dengan Para PPK di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Finalisasi penginputan RUP tahun 2024 tanggal 5-6 Maret 2024 dengan mengundang para PPK dan PP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI serta Deputi Bidang Administasi dan Narasumber dari LKPP	Undangan Rapat, Rekapitulasi Progress RUP dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 115.000.000	Telah terlaksana
Membuat Surat Klarifikasi atas Pagu Pengadaan yang harus diumumkan pada aplikasi SIRUP kepada LKPP	Surat Klarifikasi	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
FGD dengan para PPK dan PP dan mengundang Narasumber LKPP sehingga terlaksananya pengadaan	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 20.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
barang/jasa melalui Katalog Sektor							
Pendampingan pengisian E-Kontrak, E-Purchasing, E-Tendering, dan Non E-Tendering / Non E-Purchasing untuk Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 pada bulan Januari 2024	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Monitoring Proses Metode E-Purchasing sampai dengan tahapan selesai	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Pendampingan Teknis E-Purchasing kepada Para PPK	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 78.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan Teknis Tata Cara Perhitungan PDN dan TKDN dalam Praktik Pengadaan Barang/Jasa	Surat Tugas, Pointer dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 78.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan untuk para PPK dan PP agar melakukan Pencatatan pada Aplikasi SPSE untuk proses pengadaan yang tidak dilakukan dengan metode Tender dan Purchasing	Undangan FGD, Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Monitoring pencatatan pada aplikasi SPSE untuk proses pengadaan yang tidak dilakukan dengan metode Tender dan Purchasing dan menginfokan para PPK dan PP untuk menyelesaikan proses pencatatannya	Undangan, Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pelaksanaan Tender dari unit-unit kerja yang didampingi oleh JF PBJ dilakukan sampai dengan proses tender selesai	Screenshot daftar paket pekerjaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 dari web <a href="http://lpse.dpr.ri">lpse.dpr.ri</a>	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Mengingatkan kepada para PPK agar ada minimal 1 kegiatan pengadaan yang dilakukan dengan metode pembelian melalui katalog Bela Negara/Toko Daring	Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Pendampingan kepada para PPK dan PP melakukan proses Tender dilanjutkan dengan penyelesaiannya pada aplikasi E-Kontrak	Laporan singkat dan Foto kegiatan	1	-	-	-	Rp. 9.500.000	Telah terlaksana
Pendampingan kepada para PPK dan PPK untuk penyelesaian E-Kontrak sampai dengan selesai	Nota Dinas	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Penelaahan Etalase Pencetakan Produk Elektronik Penerbitan	Nota Dinas dan SK Penetapan Hasil Penelaahan Produk	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Penelaahan Etalase Produk Sarana Umum YANKES	Nota Dinas dan SK Penetapan Hasil Penelaahan Produk	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Monitoring dan Evaluasi RUP sesuai Revisi Anggaran dan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 7.000.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 7.000.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024 atas undangan Biro Persidangan I	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024 atas undangan Biro Kesekretariatan Pimpinan	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
FGD Tindak Lanjut Pemenuhan JF	Undangan Rapat dan Laporan Singkat	1	-	-	-	Rp. 25.000.000	Telah terlaksana
FGD strategi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dan Pendampingan Pengisian Si-Renaksi LKPP dengan mengundang narasumber dari LKPP	Undangan, Nota Dinas dan foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 60.000.000	Telah terlaksana
Membuat Surat perihal usulan pengangkatan JF PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain	Surat Keterangan B/178/KP.05.01/02/2024 tanggal 13 Februari 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	Surat Tugas dan Sertifikat	1	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Koordinasi dalam rangka Pemenuhan JF	Undangan, Nota Dinas dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 3.500.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
FGD dalam rangka tindak lanjut pemenuhan kebutuhan JF dan Pengelolaan SDM	Undangan, Nota Dinas dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 5.000.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Tindak Lanjut Rencana Aksi Pemenuhan JF	Nota Dinas	-	1	-	-	Rp. 2.090.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Percepatan Penerapan 17 Standard LPSE	Undangan dan Materi Bimbingan Teknis	-	1	-	-	Rp. 141.00.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2

Pelaksanaan seluruh rencana aksi ITKP Triwulan I Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Biro Umum selaku penanggungjawab sesuai dengan waktu dan target yang ditetapkan.

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/pEMs4f4cttiff9Q>

#### 14. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset:

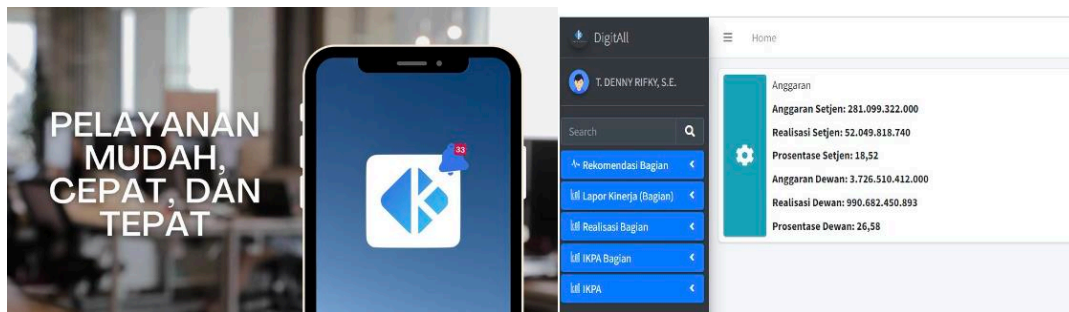
##### a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kemenkeu	93,66	94,26	96	Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyediaan Aplikasi Monitoring IKPA	Pembangunan Aplikasi DigitAll melalui fitur IKPA dan fitur Rencana Penarikan Dana	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Terbitnya Instruksi Sekretaris Jenderal terkait Perjanjian Kinerja Capaian Nilai IKPA	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya sosialisasi dan bimtek Monitoring Nilai IKPA pada Aplikasi DigitAll	1	-	-	-	Rp. 52.100.000	Telah terlaksana
	Terlaksananya sosialisasi dan bimtek Monitoring Deviasi Halaman III DIPA pada aplikasi DigitAll	1	-	-	-	Rp. 90.792.000	Belum terlaksana
	Pemberian Penghargaan bagi Unit Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi Per Triwulan	1	1	1	1	Rp. 297.690.000	Belum terlaksana
	Pembuatan Buku Saku terkait Tata Cara Panduan Monitoring Nilai IKPA dan Rencana Kegiatan	2	-	-	-	Rp. 15.000.000	Belum terlaksana

Pada rencana aksi pembangunan Aplikasi DigitAll melalui fitur IKPA dan fitur Rencana Penarikan Dana yang dibangun oleh internal Biro Keuangan telah selesai dilaksanakan dengan komitmen dan dukungan dari seluruh lini struktural mulai dari pejabat tertinggi sampai dengan staf di lingkungan kerja untuk memberikan layanan ke seluruh unit kerja dalam melakukan monitoring pelaksanaan anggaran di Sekretariat Jenderal DPR RI.



Gambar 1.7. Aplikasi DigitAll dan Tampilan Halaman Depan Aplikasi DigitAll

Kemudian untuk rencana aksi penerbitan Instruksi Sekretaris Jenderal terkait Perjanjian Kinerja Capaian Nilai IKPA yang dilatarbelakangi atas urgensi pembagian peran monitoring pelaksanaan anggaran kepada seluruh unit kerja tingkat Eselon II telah terlaksana. Melalui Instruksi Sekretaris Jenderal No. 1 Tahun 2024 tentang Rapor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Mini, capaian IKPA menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja setiap unit kerja Eselon II. Selanjutnya pada rencana aksi Pemberian Penghargaan bagi Unit Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi per Semester telah terlaksana pada awal Tahun 2024 yang diberikan kepada Capaian IKPA tertinggi di Semester II Tahun 2023. Kegiatan pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi Langkah-langkah Strategis Awal Tahun 2024.



Gambar 1.8. Sosialisasi mengenai Langkah-langkah Strategi Awal Tahun terkait Pelaksanaan Anggaran

Namun, terdapat beberapa rencana aksi yang belum dapat dilaksanakan pada Triwulan I. Salah satunya adalah rencana aksi pelaksanaan sosialisasi dan bimtek Monitoring Nilai IKPA pada Aplikasi DigitAll. Rencana aksi ini belum dapat dilaksanakan karena Aplikasi DigitAll masih dalam tahap pembangunan. Rencana aksi ini direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Juni 2024.

Begitu pula dengan rencana aksi pelaksanaan sosialisasi dan bimtek Monitoring Deviasi Halaman III DIPA pada aplikasi DigitAll yang belum dilaksanakan disebabkan data pada aplikasi SAKTI masih belum normal pada awal tahun sehingga proses interkoneksi dengan aplikasi DigitAll masih belum bisa dilakukan secara sempurna. Sosialisasi ini dijadwalkan untuk dilaksanakan pada bulan April 2024 saat data pada aplikasi SAKTI terkait capaian *output* sudah diupdate secara menyeluruh. Rencana aksi ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024.

Sedangkan untuk rencana aksi pembuatan Buku Saku terkait Tata Cara Panduan Monitoring Nilai IKPA dan Rencana Kegiatan belum dapat dilaksanakan karena kegiatan sosialisasi belum terlaksana. Rencana aksi ini direncanakan akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aktRPBfQnFzYCzi>

**b. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)**

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Capaian 2023</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Kemenkeu	3,60	3,6	3,7	Biro Keuangan

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan BPK LKPP	Jumlah dokumen monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan BPK LKPP	1	1	1	1	Rp. 25.000.000	Telah terlaksana
Monitoring realisasi PNBPN khususnya yang bersifat dari Pengelolaan BMN	Jumlah dokumen monitoring capaian PNBPN pengelolaan BMN	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan monitoring setiap triwulan terhadap seluruh dokumen persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN sudah terinput kedalam Aplikasi SIMAN modul pengawasan dan pengendalian	Jumlah laporan monitoring tindak lanjut pengelolaan BMN	1	1	1	1	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Melakukan pengajuan usulan penghapusan secara berkala	Jumlah laporan penghapusan per semester	-	1	-	1	Rp. 10.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2 dan 4
Melakukan monitoring terhadap sisa BMN	Jumlah Laporan PSP Tanah dan/atau	-	1	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2 dan 4

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
yang belum dilakukan PSP	Gedung Bangunan						

Rencana aksi monitoring penyelesaian tindaklanjut temuan BPK LKPP telah dilaksanakan dan didokumentasikan melalui Berita Acara Rekonsiliasi Progress Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022 pada DPR RI oleh Kementerian Keuangan. Hasil rekonsiliasi data menyatakan bahwa persentase tindak lanjut atas Penatausahaan Aset Tetap Tidak tertib telah dilaksanakan dengan persentase 100%. Begitu pula dengan tindak lanjut atas temuan Pencatatan Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain Tidak Tertib telah terlaksana dengan persentase 100%.

Kemudian pada rencana aksi monitoring setiap Triwulan terhadap seluruh dokumen persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN melalui Aplikasi SIMAN, telah terlaksana. Monitoring Triwulan I dilakukan dengan membandingkan antara keseluruhan dokumen sumber persetujuan pengelolaan BMN baik yang dikeluarkan oleh Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal DPR RI) maupun Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Melalui laporan monitoring Triwulan I tersebut ditemukan beberapa dokumen persetujuan seputar kegiatan pengelolaan asset yang telah ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa, BST, dan lain sebagainya tetapi belum diinput ke dalam Aplikasi SIMAN.

Selanjutnya, rencana aksi monitoring realisasi PNBPN, khususnya yang bersifat dari Pengelolaan BMN juga telah terlaksana. Tujuan kegiatan monitoring ini digunakan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan pengelolaan PNBPN, mengidentifikasi permasalahan pengelolaan PNBPN, dan/atau pengawasan PNBPN. Namun sama halnya seperti rencana aksi monitoring per Triwulan atas dokumen persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN, masih terdapat beberapa dokumen persetujuan seputar kegiatan pengelolaan asset yang telah ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa, BST, dan lain sebagainya tetapi belum diinput ke dalam Aplikasi SIMAN. Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi Bagian Administrasi BMN untuk lebih meningkatkan kinerjanya di periode mendatang sehingga target nilai Indeks Pengelolaan Aset di Tahun 2024 dapat tercapai.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yQnoePTy7D2KAz6>

### c. Opini BPK

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
BPK	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Sosialisasi pengisian Matriks Tabel A kepada seluruh unit kerja pemegang akun signifikan	1	-	-	-	Rp. 66.424.000	Telah terlaksana
	Sosialisasi dan Bimtek Kriteria Penetapan Akun Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal	1	-	-	-	Rp. 199.137.330	Telah terlaksana
Rekonsiliasi Internal dan Eksternal	Rekonsiliasi Internal Aset dan Persediaan Tiap Bulan	3	3	3	3	Rp. 353.300.000	Telah terlaksana
	Rekonsiliasi Eksternal Belanja dan Pendapatan Tiap Bulan	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
	Rekonsiliasi Eksternal Piutang atas Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai	-	1	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2 dan 4

Kegiatan rencana aksi Penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang terdiri dari dua kegiatan telah terlaksana. Pada kegiatan pertama yaitu sosialisasi pengisian Matriks Tabel A kepada seluruh unit kerja pemegang akun signifikan telah diselenggarakan dengan mengundang unit kerja pemilik akun signifikan pada tanggal 26-27 Februari 2024 di Hotel Santika Bintaro, Tangerang Selatan. Rencana aksi ini dilaksanakan sebagai upaya dini dalam mengelola risiko di unit kerja. Kemudian pada kegiatan kedua, yaitu sosialisasi Kriteria Penetapan Akun Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal telah diselenggarakan pada tanggal 8-9 Maret 2024 di Hotel Double Tree Jakarta. Rencana aksi ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman dini kepada unit kerja mengenai kriteria belanja pemeliharaan sehingga meminimalisir risiko kesalahan penggunaan akun sepanjang Tahun 2024.

Selanjutnya, pada rencana aksi Rekonsiliasi Internal Aset dan Persediaan Tiap Bulan telah berhasil dilakukan atas transaksi aset dan persediaan selama bulan Januari, Februari, dan

Maret 2024 disebabkan adanya pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan DPR RI. Selanjutnya, rencana aksi Rekonsiliasi Eksternal Belanja dan Pendapatan Tiap Bulan telah berhasil dilaksanakan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6LzPro3gS3dbHRY>

**d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Capaian 2023</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
BPK	86,75%	94,44%	95%	Inspektorat Utama

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Entry meeting Pemeriksaan BPK atas LK DPR TA 2023	Terlaksananya entry meeting Pemeriksaan BPK atas LK DPR TA 2024	1	-	-	-	Rp. 12.000.000	Telah terlaksana
Penyusunan Rekapitulasi Tanggapan Konsep Temuan BPK	Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan rekapitulasi tanggapan konsep temuan BPK	-	1	-	-	Rp. 56.825.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
	Tersedianya Rekapitulasi Tanggapan Konsep Temuan BPK	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Penyusunan Rekapitulasi Rencana Aksi Konsep LHP BPK	Tersedianya Rencana Aksi Konsep LHP BPK	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Penyusunan Rekapitulasi Tindak Lanjut 60 (enam puluh) hari LHP BPK	Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan tindak lanjut 60 (enam puluh) hari temuan BPK	-	-	1	-	Rp. 10.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Tersedianya Rencana Aksi 60 (enam puluh) hari	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Pemantauan TLHP BPK Semester I 2024	Rapat Koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan BPK	-	1	-	-	Rp. 7.087.350	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
	Tersedianya Matriks Pemantauan TLHP BPK Semester I 2024	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Rapat Koordinasi dengan BPK RI	-	-	1	-	Rp. 7.087.350	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Pemantauan TLHP BPK Semester II 2024	Rapat koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan BPK	-	-	1	-	Rp. 5.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Tersedianya Matriks Pemantauan TLHP BPK Semester II 2024	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
	Rapat Koordinasi dengan BPK RI	-	-	-	1	Rp. 5.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Penyusunan Tim TLHPKN	Tersedianya SK Tim	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Benchmarking	Tersedianya Laporan Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 109.983.000	Telah terlaksana

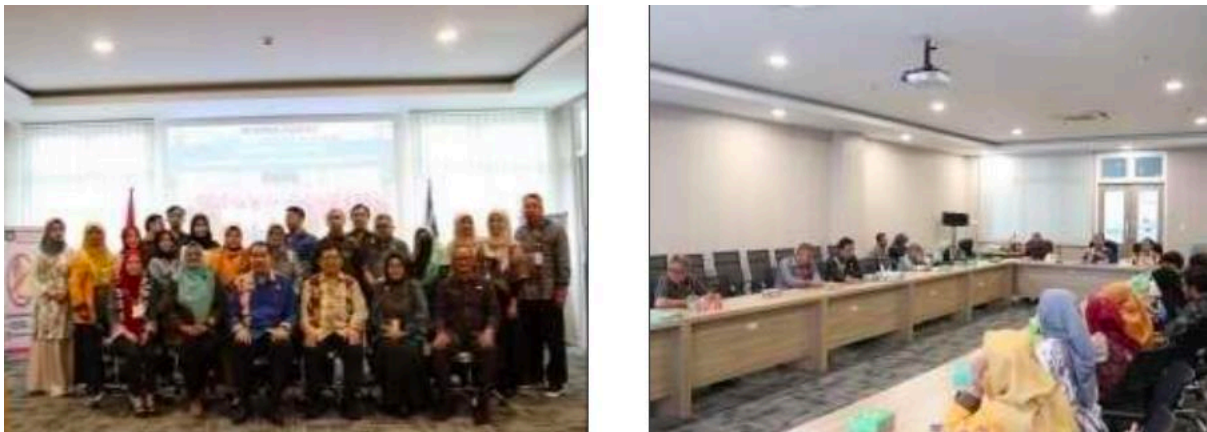
Rencana aksi *entry meeting* pemeriksaan BPK atas LK DPR TA 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024. Pada rapat tersebut BPK memaparkan aspek-aspek yang akan diperiksa pada masing-masing unit kerja, beserta *timeline* kegiatan pemeriksaan. Selanjutnya

rencana aksi penyusunan Tim TLHPKN telah terlaksana dengan diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 73/SEKJEN/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Sekretariat Jenderal DPR RI TA 2024. Tim TPKN sendiri terdiri dari unit kerja yang membidangi Pengawasan Internal, Keuangan, Administrasi BMN, dan Kepegawaian.



Gambar 1.9. *Entry meeting* BPK atas Pemeriksaan LK 2023

Selanjutnya untuk rencana aksi *benchmarking* telah terlaksana pada tanggal 26-28 Februari 2024. Bagian Administrasi Inspektorat Utama beserta Inspektur I sebagai Ketua Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK serta Penyelesaian Kerugian Negara (TLHPKN) TA 2023 mengadakan kegiatan *benchmarking* ke Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan perbaikan penyelenggaraan dukungan teknis administrasi terhadap Tim TPKN, serta pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.



Gambar 1.10. *Benchmarking* ke Inspektorat Lombok Tengah

Kemudian untuk perkembangan penyelesaian rekomendasi BPK, Inspektorat Utama telah melakukan pemantauan tindak lanjut TLHP BPK pada periode Semester II 2023 sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) rekomendasi yang terdiri dari 100 (seratus) rekomendasi diajukan ke status 1 (selesai) dan 23 (dua puluh tiga) rekomendasi diajukan ke status 4 yaitu tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah, namun sampai saat ini belum diketahui hasil/persentase dari penyelesaian tindak lanjut tersebut dikarenakan masih dalam proses telaah oleh BPK RI.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aP9DoDfyNAebi5L>

### 15. Penguatan Sistem Merit, Manajemen Talenta, Kinerja Pegawai dan Jabatan Fungsional

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
KASN	345,5	363	363	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

<i>Rencana Aksi</i>	<i>Indikator Output</i>	<i>Target Penyelesaian</i>				<i>Jumlah Anggaran</i>	<i>Penjelasan Capaian</i>
		<i>TW 1</i>	<i>TW 2</i>	<i>TW 3</i>	<i>TW 4</i>		
<i>Update data talenta di SiMata</i>	<i>Laporan update data per semester</i>	-	1	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2 dan 4
Pemenuhan 20 JP pelatihan bagi setiap pegawai	Laporan pelaksanaan pelatihan per triwulan	1	1	1	1	Rp. 10.004.738.000	Telah terlaksana
Evaluasi berkala penerapan sistem merit	Laporan penerapan sistem merit per semester	-	1	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2 dan 4

Rencana aksi pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai 20 (dua puluh) JP telah dilaporkan pelaksanaannya oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif. Dari jumlah total PNS Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu 1.267 PNS, terdapat 206 (dua ratus enam) PNS atau sekitar 16% yang telah memperoleh pengembangan kompetensi 20 (dua puluh) JP atau lebih. Kemudian untuk PNS yang mendapatkan pengembangan kompetensi di bawah 20 (dua puluh) JP sebanyak 551 (lima ratus lima puluh satu) orang atau sekitar 44% dari total PNS Sekretariat Jenderal DPR RI. Sedangkan untuk PNS yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi adalah sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) orang atau 40% dari total PNS Sekretariat Jenderal DPR RI.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/YHPqKJpwmDFr4MG>

### 16. Pelaksanaan Core Value ASN: Indeks BerAKHLAK

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
KemenPANRB	60,7%	61,7%	75%	Pusat Pengembangan Kompetensi

				Sumber Daya Manusia Legislatif
--	--	--	--	-----------------------------------

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pelaksanaan Kuis dan Melayani Aplikasi Bangsa di SIRAJIN	Penyusunan Soal Kuis BerAKHLAK	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
	Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	1	-	-	Rp. 5.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
	Pengumuman Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Penguatan nilai-nilai BerAKHLAK	Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Seminar Penguatan <i>Core Value</i> BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Kegiatan Seminar Penguatan <i>Core Value</i> BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 100.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Sosialisasi Panduan <i>Core Value</i> BerAKHLAK	Sosialisasi Pedoman Panduan <i>Core Value</i> BerAKHLAK di Portal DPR	-	1	-	-	Rp. 15.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pemberian Penghargaan Pemenang BerAKHLAH bagi Kuis	Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK	-	-	-	1	Rp. 5.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Pada indikator Indeks BerAKHLAK, target penyelesaian rencana aksi dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan 2. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan 1.

#### 17. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima:

##### a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
KemenPANRB	82,757	93,13	93,25	Pusat Analisis Keparlemenan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Pedoman Survei di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang terintegrasi	Terbentuknya Tim Penyusun Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Survei	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017						
Penguatan Standar Pelayanan	Tersusunnya kuesioner Reviu Standar Pelayanan	80	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya pendampingan Pengisian Kuesioner yang diawali dengan Sosialisasi pengisian	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya kegiatan pengisian survei	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya input data kuesioner survey yang telah diisi	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
	Terlaksananya pengolahan data kuesioner	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
	Tersusunnya Laporan Reviu Standar Pelayanan	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Penguatan Penyelenggaraan Survei	Pembuatan Surat Edaran/Peraturan Sekretaris Jenderal	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Pengembangan Aplikasi SKM	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	untuk pengelolaan hasil survei terintegrasi						Triwulan 3
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Survei di seluruh layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 52.290.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Penyelenggaraan Survei terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan	Terbentuknya Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesekretariatan Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesekretariatan Jenderal DPR RI secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan	-	-	1	-	Rp. 155.950.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Tersusunnya Laporan SKM	-	-	5	-	Rp.0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024						Triwulan 3
Optimalisasi Evaluasi dan Tindak Lanjut SKM	Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Tersusunnya Laporan Rekomendasi atas Evaluasi Hasil SKM	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Penyampaian Laporan dan Hasil Penilaian Kinerja Survei per unit kerja kepada Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai salah satu pengukuran dalam Penilaian Kinerja	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Rencana aksi penyusunan Pedoman Survei di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI terintegrasi yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan telah terlaksana pada Triwulan I sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pada kegiatan pertama yaitu terbentuknya Tim Penyusun Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 diawali dengan pertemuan pendahuluan untuk meminta arahan kepada Kepala Pusat Analisis Keparlemenan dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi mengenai poin-poin penting dalam penyelenggaraan SKM pada tahun 2024 sebagai landasan penyusunan Renaksi SKM tahun 2024. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2024, telah disetujui pembentukan Tim Squad #1 yang ditugaskan untuk menyusun Pedoman Penyelenggaraan Survei di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan.

Selanjutnya untuk kegiatan kedua pada rencana aksi yang sama, yaitu kegiatan penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 saat ini berada dalam tahap

penyusunan dan telah dihasilkan draft awal Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI. Draft pedoman tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Pusat Analisis Keparlemen untuk mendapat masukan dan arahan lanjutan. Proses perbaikan dan penyempurnaan draft akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024.



Gambar 1.11. Pedoman Penyelenggaraan Survei Mandiri di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Pada rencana aksi tersusunnya kuesioner dan pengisian kuesioner oleh pelaksana unit layanan dan pengampu penyelenggara layanan telah terlaksana. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 yang diinisiasi oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana berkerjasama dengan Pusat Analisis Keparlemen. Kegiatan ini merupakan upaya penguatan atas pelaksanaan survei layanan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini melibatkan seluruh Kepala Bagian dari unit kerja penyelenggara layanan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang kemudian ditetapkan sebagai responden survei. Hadir sebagai narasumber Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif KemenPANRB untuk membahas mengenai Standar Pelayanan Publik mengacu pada PermePANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Sebagai bentuk tindak lanjut atas survei yang dilaksanakan, saat ini 80 (delapan puluh) kuesioner yang telah terisi sedang dalam tahap input data walaupun masih terdapat beberapa layanan yang belum mengumpulkan kuesioner. Selanjutnya, jika semua kuesioner telah terisi dan diinput maka akan dilakukan pengolahan dan analisis data pada Triwulan II 2024.





Gambar 1.12. Kegiatan Reviu Standar Pelayanan

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/zytFcgEjWFiK2T4>

**b. Indeks Pelayanan Publik**

<i>Leading Sector</i>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Capaian 2023</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
KemenPANRB	4,31	4,40	4,51	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Pembentukan Tim Pendampingan ULE dan Evaluasi Mandiri Instansional PEKPPP	Dokumen Surat Tugas/SK Tim	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Rapat Kerja Persiapan PEKPPP 2024	Hasil Rapat dan Pembagian Tugas Tim	1	-	-	-	Rp. 1.540.000	Telah terlaksana
Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Tersedianya Laporan FKP	-	1	-	-	Rp. 35.375.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersedianya Laporan SKM	-	-	1	-	Rp. 52.290.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional	Tersedianya Laporan PEKPPP	-	-	1	-	Rp. 4.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Pelaporan PEKPPP ke KemenPANRB	Dokumen tanda terima pelaporan PEKPPP dari KemenPANRB	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil FKP dan SKM	Tersedianya dokumen Rencana Tindak Lanjut	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Pelaksanaan RTL	Capaian realisasi pelaksanaan RTL	-	-	-	100%	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Rencana aksi pembentukan Tim Pendampingan ULE dan Evaluator PEKPPP Mandiri Instansional telah dilaksanakan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 400/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Unit Lokus Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024, dan Surat Tugas No. 14/OT.05/2024 tanggal 22 Februari 2024.

Kemudian untuk rencana aksi Rapat Kerja Persiapan PEKPPP 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024. Melalui rapat tersebut, disepakati bahwa salah satu rencana aksi yang dipersiapkan oleh Tim PEKPPP Sekretariat Jenderal DPR RI dalam pelaksanaan PEKPPP Instansional adalah penyelenggaraan Kompetisi Layanan Publik Internal pada 31 (tiga puluh satu) Standar Pelayanan yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI. Terkait dengan indikator, parameter, serta *reward* atas Kompetisi Layanan Publik tersebut akan didiskusikan secara lebih lanjut oleh tim kecil yang telah ditetapkan.



Gambar 1.13. Rapat Kerja Persiapan PEKPPP 2024

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/4EzMi2t5ApLL33W>

## LAPORAN PELAKSANAAN RB TEMATIK TRIWULAN I TAHUN 2024

### SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 setelah dilakukan penajaman dan dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023. RB Tematik pada dasarnya merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintah (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas Pembangunan Nasional secara kolaboratif. Pelaksanaan RB Tematik dilakukan untuk mendorong percepatan RB yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sasaran pelaksanaan RB Tematik dan indikatornya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga. Namun pada dasarnya, RB Tematik dituangkan ke dalam lima tema yang mendukung tujuan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, DPR RI memiliki intervensi yang penting untuk lima tema RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, peningkatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, dan peningkatan produk dalam negeri. Dalam melaksanakan intervensi tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI berperan sebagai sistem pendukung DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian berupa *scientific evidence* kepada DPR RI sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan dapat mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Nasional. Dukungan tersebut berupa produk-produk analisis, kajian, ataupun Naskah Akademik yang dihasilkan oleh unit kerja di bawah Eselon 1 (Pusat) di lingkungan Badan Keahlian DPR RI. Dengan adanya dukungan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Badan Keahlian DPR RI, tujuan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam lima tema RB diharapkan akan tercapai.

Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB Tematik Sekretariat Jenderal DPR RI beserta capaiannya pada Triwulan I Tahun 2024.

#### A. PROGRES CAPAIAN SASARAN TEMATIK, DAN INDIKATOR SASARAN TEMATIK TRIWULAN I TAHUN 2024

##### 1. Pengentasan Kemiskinan

Dalam tema pengentasan kemiskinan, Sekretariat Jenderal DPR RI mengangkat isu terkait nelayan Indonesia yang menghadapi tantangan ekonomi serius, terutama di tengah ambisi pemerintah untuk menggenjot ekonomi biru. Meskipun Indonesia memiliki potensi laut yang luar biasa, kesejahteraan nelayan tradisional seringkali dikesampingkan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di kalangan nelayan, antara lain, modal yang lemah, permainan harga jual ikan, keterbatasan daya serap industri pengelolaan ikan, dominasi armada tangkap nelayan asing, dan

keterbatasan penguasaan pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, pemberdayaan nelayan skala kecil memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya pengentasan kemiskinan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersirkulasinya hasil kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan sebagai bahan pertimbangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan;
- 2) Tersirkulasinya hasil kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan baik dari aspek peraturan perundang-undangan, pengawasan maupun anggaran.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

- 1) Tersampainya hasil kajian kepada Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan;
- 2) Tersampainya hasil kajian kepada 15 (lima belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Penguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Asistensi Pansus RUU Kelautan	Jumlah dokumen	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar tentang sumber daya kelautan	Jumlah dokumen	-	2	-	-	Rp. 25.200.000	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Penyusunan kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan sebagai bahan pertimbangan pembahasan RUU tentang Kelautan	Jumlah dokumen	-	1	-	-	Rp. 51.435.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Pendampingan dalam pembahasan Undang-Undang	Jumlah dokumen	-	-	1	1	Rp. 0	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3 dan 4

Pembentukan Tim Penguatan Analisis tentang Perikanan Terukur	Jumlah AKD/Kementerian/L ermbaga/ Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	1	-	-	-	Rp. 0	Lain-lain	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait kebijakan perikanan terukur	Jumlah AKD/Kementerian/L ermbaga/ Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	2	-	-	-	Rp. 25.200.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Pengumpulan data ke daerah terkait kebijakan perikanan terukur	Jumlah AKD/Kementerian/L ermbaga/ Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	1	-	-	-	Rp. 34.300.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Pembentukan Tim Penguatan Analisis tentang Pemberdayaan Nelayan	Jumlah AKD/Kementerian/L ermbaga/ Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	-	1	-	-	Rp. 0	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait pemberdayaan nelayan	Jumlah AKD/Kementerian/L ermbaga/ Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	-	1	-	-	Rp. 12.600.000	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Pengumpulan data ke daerah terkait pemberdayaan nelayan	Jumlah AKD/Kementerian/L ermbaga/	-	1	-	-	Rp. 34.300.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan

	Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya							2
Penyusunan kajian terkait sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan, baik dalam laporan akhir maupun dalam produk-produk periodik	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/ Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	-	-	1	-	Rp. 51.435.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Penyampaian hasil kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing</i> terintegrasi ( <i>cloud</i> )	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/ Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	-	-	-	15	Rp. 112.500.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Rencana aksi pembentukan Tim Asistensi Pansus RUU Kelautan telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Nota Dinas Nomor: 1006/LG.02.02/10/2023, Hal: Penyampaian Nama, pada tanggal 30 Oktober 2023. Begitu juga dengan rencana aksi pembentukan Tim Penguatan Analisis tentang Perikanan Terukur yang telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Tugas Nomor: 168/PN.01.02/02/2024 dan Surat Tugas Nomor: 115/PN.01.02/02/2024.

Kemudian rencana aksi diskusi dengan pakar tentang sumber daya kelautan telah dilaksanakan dalam bentuk FGD pada Rabu, 15 Mei 2024 di Hotel Pullman Jakarta. Selanjutnya, rencana aksi pengumpulan data ke daerah terkait kebijakan perikanan terukur juga telah dilaksanakan. Pengumpulan data dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 19 Februari 2024, dan PPN Kejawanan Cirebon pada tanggal 26 Februari 2024 dengan tujuan untuk penguatan analisis terkait perikanan terukur.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/p9zExt7tp7BoZMW>

## 2. Peningkatan Investasi

Dalam tema peningkatan investasi, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa salah satu *intangible asset* perekonomian yang dapat menopang perekonomian nasional kedepan adalah sektor pariwisata. Namun, sektor pariwisata Indonesia masih relatif tertinggal dengan negara sekawasan yang menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor

unggulan perekonomian, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Salah satu penyebab ketertinggalan tersebut adalah rendahnya investasi sektor pariwisata. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya peningkatan investasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya norma yang berkaitan dengan penguatan investasi di sektor pariwisata dalam naskah akademik dan RUU;
- 2) Tersirkulasinya hasil kajian tentang determinan rendahnya investasi di sektor pariwisata baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun anggaran.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

- 1) Tersusunnya norma penguatan investasi di sektor pariwisata;
- 2) Tersampainya hasil kajian kepada 15 (lima belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Penguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Peningkatan Investasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah naskah Akademik dan RUU	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan naskah akademik dan RUU	Jumlah naskah Akademik dan RUU	-	1	1	-	Rp. 102.870.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2 dan 3
Penyampaian naskah akademik dan RUU kepada Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah naskah Akademik dan RUU	-	-	-	15	Rp. 3.000.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Pembentukan Tim Penyusun Kajian	Jumlah AKD/Kem enterian/L embaga/ Perguruan Tinggi	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pemetaan determinan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata	Jumlah AKD/Kem enterian/L embaga/	-	1	-	-	RP. 51.435.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan

	Perguruan Tinggi							2
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait determinan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	3	-	-	Rp. 19.350.000	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Penyusunan kajian terkait penyelesaian permasalahan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	-	1	-	Rp. 100.424.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I terkait pelaksanaan sirkulasi kajian	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	-	1	-	Rp.3.000.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing</i> terintegrasi ( <i>cloud</i> )	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	-	-	15	Rp. 112.500.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Rencana aksi pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Tugas Nomor: B/631/HK.01.01/1/2022 pada tanggal 26 Januari 2022. Kemudian rencana aksi pembentukan Tim Penyusun Kajian telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Tugas Nomor: B/36A/HK.01.01/1/2024 pada tanggal 17 Januari 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6BrAbWkzBGZW0Dc>

### 3. Pengendalian Inflasi

Dalam tema pengendalian inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa inflasi di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh *Volatile Food* yang mayoritas dipenuhi dari impor (komoditas pangan dan hortikultura) akibat ketidakseimbangan produksi dan konsumsi. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya pengendalian inflasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah tersirkulasinya hasil kajian dalam proses pembahasan anggaran dan pengawasan terkait pengendalian inflasi, khususnya upaya mengatasi ketidakseimbangan produksi dan konsumsi komoditas pangan dan hortikultura. Indikator dari sasaran tersebut adalah tersampainya hasil kajian kepada 15 (lima belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Pengendalian Inflasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Penyusun Kajian	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pemetaan determinan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	1	-	-	-	Rp. 51.435.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait determinan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	-	2	-	-	Rp. 14.400.000	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Penyusunan kajian terkait penyelesaian permasalahan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi dalam rangka pengendalian inflasi	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	-	1	-	-	Rp. 150.930.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II terkait	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/	-	-	1	-	Rp. 3.000.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan

pelaksanaan sirkulasi kajian	Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya							3
Penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing</i> terintegrasi ( <i>cloud</i> )	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/ Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	-	-	15	-	Rp. 112.500.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Rencana aksi pembentukan Tim Penyusunan Kajian telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Tugas Nomor: B/60A/HK.01.01/1/2024 pada tanggal 25 Januari 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/zyFYT8F7CzMo7qX>

#### 4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Dalam tema pengendalian inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa capaian predikat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada 621 Instansi Pusat dan Daerah tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SPBE masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya digitalisasi administrasi pemerintah yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah tersirkulasinya hasil kajian hambatan pelaksanaan SPBE. Indikator dari sasaran tersebut adalah tersampainya hasil kajian kepada 18 (delapan belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Penyusun Kajian	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/ Perguruan Tinggi	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana

Pengumpulan data dan informasi secara primer dan sekunder	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	1	-	-	-	Rp. 68.800.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	1	-	-	Rp. 8.400.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Penyusunan kajian terkait hambatan pelaksanaan SPBE	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	1	-	-	Rp. 4.500.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II terkait pelaksanaan sirkulasi kajian	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	-	1	-	Rp. 3.000.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing</i> terintegrasi ( <i>cloud</i> )	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	-	18	-	Rp. 135.00.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Rencana aksi pembentukan Tim Penyusunan Kajian telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Tugas Nomor: B/55A/HK.01.01/1/2024 pada tanggal 25 Januari 2024. Kemudian untuk rencana aksi pengumpulan data dan informasi secara primer dan sekunder pun telah dilaksanakan oleh Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara selaku penanggungjawab sesuai dengan waktu dan target yang ditetapkan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ntg4PkcoLmeNEp4>

## 5. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam tema penggunaan produk dalam negeri, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa perlunya penggunaan anggaran belanja barang/jasa untuk meningkatkan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40%. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya digitalisasi administrasi pemerintah yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada

tahun 2024 adalah terealisasinya anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk meningkatkan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Indikator dari sasaran tersebut adalah penggunaan produk dalam negeri sebesar 40%.

Capaian sasaran dan indikator tema Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase penggunaan produk dalam negeri	1	-	-	-	Rp. 0	Lain-lain	Telah terlaksana
Pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40%	Persentase penggunaan produk dalam negeri	1	1	1	1	Rp. 9.000.000	Lain-lain	Telah terlaksana

Rencana aksi pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 284/SEKJEN/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 1369/SEKJEN/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kemudian rencana aksi pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40% pun mulai dilaksanakan secara berkala.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eQacBYbX3sCZXNA>

## **LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN RB TAHUN 2024 SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan MenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan MenPANRB Nomor 9 Tahun 2023, Evaluator Internal Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tujuan evaluasi untuk memastikan *Road Map* dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal RB dilakukan terhadap Evaluasi Perencanaan (*ex-ante*) dengan mempelajari dan menelaah rancangan dokumen perencanaan RB yakni kesesuaian sasaran, indikator, dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* RB Sekretariat Jenderal DPR RI dengan *Road Map* RB Nasional, kesesuaian rencana aksi unit kerja dengan rencana aksi Sekretariat Jenderal DPR RI, ketepatan kegiatan/strategi dalam rencana aksi dibandingkan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, keberadaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan, dan keabsahan *Road Map* RB dan rencana aksi untuk menjadi dokumen acuan pelaksanaan RB.

Sedangkan mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal RB terhadap Evaluasi Pelaksanaan (*on-going*) dilakukan dengan mempelajari dan menelaah pelaksanaan rencana aksi untuk mendapatkan informasi mengenai ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi, ketercapaian *output* kegiatan pada setiap triwulan, kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan); dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi. Dari 25 (dua puluh lima) indikator yang menjadi penilaian dalam evaluasi internal terdapat 1 (satu) indikator yaitu “Indeks Kualitas Kebijakan Publik” yang dikecualikan karena Kementerian PANRB tidak melaksanakan kegiatan penilaian terhadap Indeks Kualitas Kebijakan Publik di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2023 berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/13464/OT.05.02/11/2023 yang ditujukan kepada Kementerian PANRB dan Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/12387/OT.05.01/10/2023 yang ditujukan kepada Deputi Bidang Kajian dan Kebijakan Inovasi LAN RI serta Surat Tanggapan IKK dari LAN RI Nomor 3845/D.1/HKM.02.2. Selain itu terdapat 2 (dua) indikator yaitu “Penataan Jabatan Fungsional” dan “Pengelolaan Kinerja ASN” telah menjadi bagian dari indikator “Indeks Sistem Merit”. Dengan demikian jumlah indikator yang menjadi penilaian di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah 22 (dua puluh dua) indikator.

Dalam pelaksanaan evaluasi internal, Evaluatur Internal melibatkan lini kedua yaitu unit Pengelolaan Kinerja Organisasi Reformasi Birokrasi (PKORB) sebagai unit yang berkontribusi di dalam pengelolaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI dan dalam mendapatkan informasi mengenai evaluasi *ex-ante* dan *on-going*.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dan disampaikan melalui Surat Nomor: T/242/PI.03/03/2024 pada tanggal 27 Maret 2024, hasil evaluasi internal RB di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

## **A. HASIL EVALUASI INTERNAL *EX-ANTE***

### **I. CATATAN**

Atas perencanaan RB baik di level instansi maupun di level unit kerja dapat berisi hal-hal berikut:

- 1) Informasi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi RB tahun sebelumnya.  
Tim RB Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan beberapa kali kegiatan rapat untuk membahas serta menindaklanjuti rekomendasi terkait penyusunan rencana aksi dan hasil rekomendasi evaluasi Kemenpan RB tahun 2023.
- 2) Catatan atas kualitas *Road Map* RB dan Rencana Aksi RB Sekretariat Jenderal DPR RI.
  - a. **Kualitas *Road Map***
    - i. Terdapat kesesuaian sasaran (*outcome*), indikator, dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* RB Sekretariat Jenderal DPR RI dengan *Road Map* RB Nasional.
    - ii. Terdapat kesesuaian rencana aksi unit kerja dengan rencana aksi Sekretariat Jenderal DPR RI.
    - iii. Terdapat ketepatan kegiatan dalam rencana aksi, yaitu identifikasi atas permasalahan dan kebutuhan perbaikan tata kelola.
    - iv. Terdapat keberadaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan.
    - v. Telah terdapat keabsahan *Road Map* RB dan rencana aksi untuk menjadi dokumen acuan pelaksanaan RB.
  - b. **Kualitas rencana aksi**
    - i. Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana, yaitu rencana aksi yang dituangkan berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan di Sekretariat Jenderal DPR RI.
    - ii. Target dari setiap kegiatan utama yang ditetapkan telah memperhatikan kelogisan, realistis dan berorientasi peningkatan dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi.
    - iii. Rencana aksi telah disahkan dengan penandatanganan penanggungjawab dan koordinator pada setiap kegiatan utama.

- iv. Seluruh rencana aksi telah memperhatikan kelogisan terhadap pencapaian target melalui penetapan indikator *output* yang selaras dengan kegiatan utama.
- v. Sebagian besar indikator *output* yang disusun telah memiliki relevansi dan cukup dalam menjawab rencana aksi yang ditetapkan.
- vi. Sebagian besar target pada indikator *output* telah memenuhi aspek kejelasan, kelayakan, dan keterukuran.
- vii. Ketersediaan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan aksi yang telah ditetapkan.

## II. REKOMENDASI

Rekomendasi perbaikan konkret untuk ditindaklanjuti berdasarkan catatan perencanaan RB (*ex-ante*) yaitu agar Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pelaksanaan kegiatan RB sesuai dengan *road map* dan rencana aksi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan catatan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh Inspektorat Utama selaku Evaluator Internal, para penanggungjawab dan PIC masing-masing Indikator Kegiatan Utama RB telah melakukan revisi atau perbaikan atas Rencana Aksi untuk 4 Triwulan ke depan. Hasil perbaikan Rencana Aksi tersebut kemudian diterima oleh Bagian PKORB untuk selanjutnya dilakukan monitoring per Triwulan.

## B. HASIL EVALUASI INTERNAL ON-GOING TRIWULAN I TAHUN 2024

### I. CATATAN

Atas pelaksanaan rencana aksi RB, berisi tentang ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi, ketercapaian *output* kegiatan pada setiap Triwulan, kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan), dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi adalah sebagai berikut:

	PERNYATAAN	CAPAIAN
A.	Ketepatan Pelaksana Komponen Aksi	
1.	Tingkat Impelementasi Penyederhanaan Birokrasi	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Sebagian besar eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Sebagian besar eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi

5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Sebagian besar eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Masturitas SPIP	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan II-IV
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Seluruh eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Seluruh eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik: Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Seluruh eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	Sebagian besar eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
12.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Sebagian besar eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Seluruh eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Sebagian besar eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Seluruh eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Sebagian besar eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
17.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	Seluruh eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
18.	Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAkhlak	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV
19.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Seluruh eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi

20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Sebagian besar eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Sebagian besar eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
22.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Seluruh eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
23.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Semua eviden telah sesuai dalam pelaksanaan komponen aksi
24.	Penataan Jabatan Fungsional	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
25.	Pengelolaan Kinerja ASN	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV
<b>B. Ketercapaian Output Aksi Pada Setiap Triwulan</b>		
1.	Tingkat Impelemntasi Penyederhanaan Birokrasi	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Sebagian besar <i>output</i> aksi telah tercapai di Triwulan I dan beberapa aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan II
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Telah tercapai seluruh <i>output</i> aksi di Triwulan I
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Telah tercapai seluruh <i>output</i> aksi di Triwulan I
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Masturitas SPIP	Telah tercapai seluruh <i>output</i> aksi di Triwulan I, dan beberapa kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Telah tercapai seluruh <i>output</i> aksi di Triwulan I
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Telah tercapai seluruh <i>output</i> aksi di Triwulan I

9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik: Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Telah tercapai seluruh <i>output</i> aksi di Triwulan I
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	Sebagian besar <i>output</i> aksi telah tercapai di Triwulan
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Telah tercapai seluruh <i>output</i> aksi di Triwulan I
12.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Sebagian besar <i>output</i> aksi telah tercapai di Triwulan I dan beberapa kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Telah tercapai seluruh <i>output</i> aksi di Triwulan I
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Sebagian besar <i>output</i> aksi telah tercapai di Triwulan I
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Telah tercapai seluruh <i>output</i> aksi di Triwulan I
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Sebagian besar <i>output</i> aksi telah tercapai di Triwulan I
17.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	Telah tercapai seluruh <i>output</i> aksi di Triwulan I
18.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN: Indeks BerAkhlak	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV
19.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Sebagian besar <i>output</i> aksi telah tercapai di Triwulan I dan beberapa aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Sebagian besar <i>output</i> aksi telah tercapai di Triwulan I
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Sebagian besar <i>output</i> aksi telah tercapai di Triwulan I dan beberapa aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV
22.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Telah tercapai seluruh <i>output</i> aksi di Triwulan I
23.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Telah tercapai seluruh <i>output</i> aksi di Triwulan I
24.	Penataan Jabatan Fungsional	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan III

25.	Pengelolaan Kinerja ASN	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV
<b>C. Kualitas Pelaksanaan Aksi (Manajemen/Pengelolaan Kegiatan)</b>		
1.	Tingkat Impelemntasi Penyederhanaan Birokrasi	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Secara kualitas sebagian besar eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Seluruh eviden secara kualitas telah mampu menjawab rencana aksi di Triwulan 1
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Seluruh eviden secara kualitas telah mampu menjawab rencana aksi di Triwulan 1
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Masturitas SPIP	Seluruh eviden secara kualitas telah mampu menjawab rencana aksi di Triwulan 1
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Secara kualitas seluruh eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Secara kualitas sebagian besar eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik: Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Seluruh eviden secara kualitas telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	Secara kualitas sebagian besar eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh eviden secara kualitas telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
12.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Secara kualitas sebagian besar eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1

13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Secara kualitas seluruh eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Secara kualitas sebagian besar eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Secara kualitas seluruh eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Secara kualitas sebagian besar eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
17.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	Secara kualitas seluruh eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
18.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN: Indeks BerAkhlak	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV
19.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Secara kualitas seluruh eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Secara kualitas sebagian besar eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Secara kualitas sebagian besar eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
22.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Secara kualitas seluruh eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
23.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Secara kualitas seluruh eviden telah menjawab rencana aksi di Triwulan 1
24.	Penataan Jabatan Fungsional	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
25.	Pengelolaan Kinerja ASN	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV
<b>D. Kesesuaian Pelaksanaan Aksi Dengan Waktu yang Telah Ditetapkan Dalam Rencana Aksi</b>		
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV

3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Masturitas SPIP	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik: Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
12.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, sebagian aksi

	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, sebagian aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
17.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
18.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN: Indeks BerAkhlak	Pelaksanaan komponen aksi baru akan dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV
19.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, sebagian aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
22.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
23.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Berdasarkan laporan progress dan bukti dukung Triwulan I, pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi
24.	Penataan Jabatan Fungsional	Berdasarkan rencana aksi, tidak terdapat pelaksanaan aksi yang direncanakan untuk dilakukan pada Triwulan I
25.	Pengelolaan Kinerja ASN	Berdasarkan rencana aksi, tidak terdapat pelaksanaan aksi yang direncanakan untuk dilakukan pada Triwulan I

## **II. REKOMENDASI**

Rekomendasi perbaikan konkret untuk ditindaklanjuti berdasarkan atas catatan pelaksanaan rencana aksi RB (*on-going*) yaitu agar Sekretaris Jenderal DPR RI melalui Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI TA 2024 melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pelaksanaan kegiatan RB sesuai dengan *Road Map* dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.